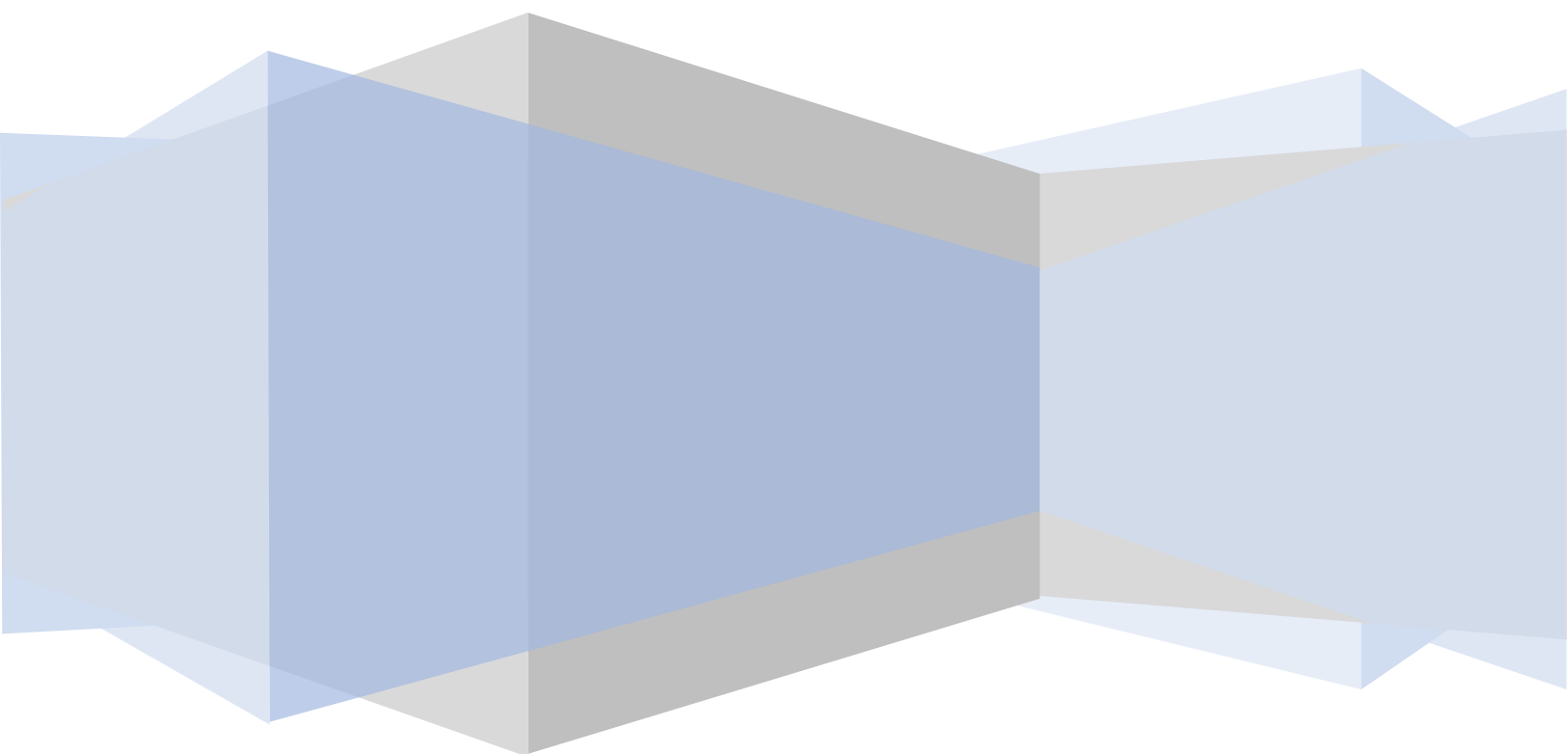


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

# LKIP BPKAD KOTA CIMAHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023



## KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini.

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Amin.

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH, *l***



**HARJONO, S.Pd.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700710 199201 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2013-2026 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset.

Selama tahun anggaran 2023, BPKAD didukung penyediaan anggaran sebesar Rp. 28.833.670.767,00, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.17.183.841.256,00, belanja modal sebesar Rp. 521.823.300,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 11.128.006.211,00 dengan pencapaian realisasi sebesar 16.151.994.763 atau 56,02% yang terdiri dari Rp.12.638.294.105,00

atau 73,55% untuk belanja operasional, Rp.506.862.900,00 untuk belanja modal atau 97,13% dan 3.006.837.758,00 atau 27,02% untuk belanja tidak terduga.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pada tahun 2023 fokus utama pencapaian kinerja khususnya dalam penataan utilisasi aset daerah sudah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
2. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Beberapa hal di atas dilakukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD, legalisasi kepemilikan aset, mempercepat ketersediaan dan meningkatkan kualitas data keuangan dan aset serta pemanfaatan aset guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Mengacu kepada hasil nilai LKIP BPKAD tahun 2022 yang memperoleh nilai 80,80 dengan predikat A, ada beberapa perbaikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yang didasarkan kepada LHE Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nomor : 700.02/118/Sekre dari Inspektorat Kota Cimahi. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

- Pedoman teknis perencanaan kinerja belum memasukan dasar aturan terbaru Permendagri No 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 .
- Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) namun belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Pengukuran Kinerja

Belum sepenuhnya pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.

c. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

Beberapa rekomendasi tersebut menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan tugas di BPKAD yang dilaksanakan di tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2023 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2023, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,76 %.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	72%	71,83 %	99,76 %
<b>Rata - Rata Capaian</b>						<b>99,92 %</b>

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi .....	2
1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi .....	2
1.3.2 Isu Strategis.....	6
1.4 Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi .....	11
2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 .....	11
2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran .....	12
2.4 Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>31</b>
3.1 Akuntabilitas Kinerja .....	31
3.2 Pengukuran Kinerja.....	33
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	46
3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan .....	45
3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu .....	50
3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	50
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	51
3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	53
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	54
3.4.1 Belanja Operasional.....	55
3.4.2 Belanja Modal .....	56
3.4.3 Belanja Tidak Terduga .....	56
3.5 Evaluasi Kinerja.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan pelaporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 tingkat pencapaiannya sebesar 99,92%. Hal ini didukung oleh pencapaian atas dua indikator utama yang mencapai 100% yaitu (1) penyusunan APBD yang tepat waktu dan (2) prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan satu indikator utama lainnya yaitu rasio utilisasi aset mencapai 99,76 %.

Mengacu kepada hasil yang diuraikan di atas, maka pada tahun 2023 BPKAD berusaha mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja terutama pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam memenuhi target akhir rencana strategis rasio utilisasi sebesar 72% yaitu :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
3. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus

menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi**

### **1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 36 PNS dan 1 orang P3K.

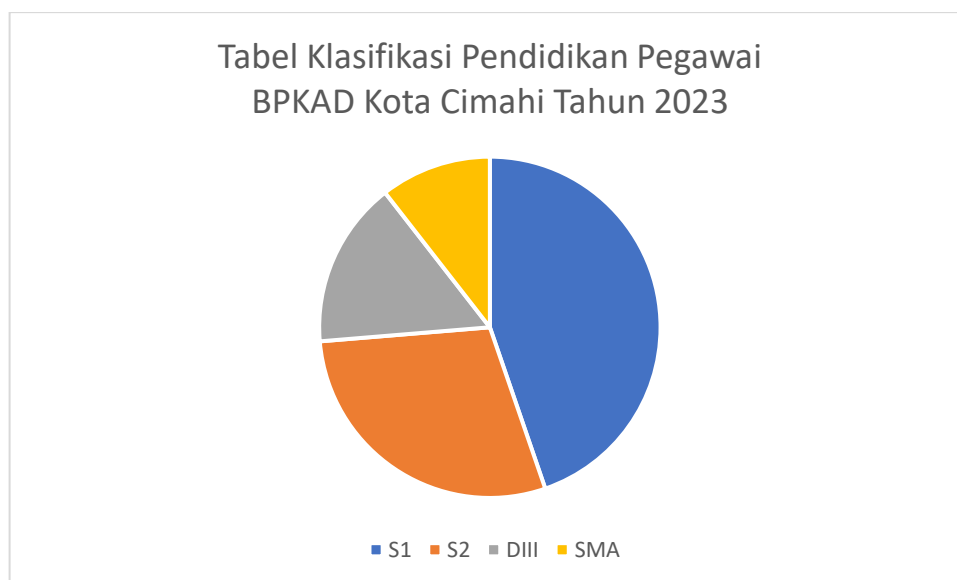
Tabel 1.1

Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV / c	1 Orang
Pembina Tk I	IV / b	1 Orang
Pembina	IV / a	3 Orang
Penata Tk I	III / d	4 Orang
Penata	III / c	9 Orang
Penata Muda Tk I	III / b	8 Orang
Penata Muda	III / a	7 Orang
Pengatur Tk I	II / d	3 Orang
P3K	09	1 Orang

Pegawai BPKAD dalam mencapai kinerja yang dibutuhkan diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan.

Gambar 1.1.  
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

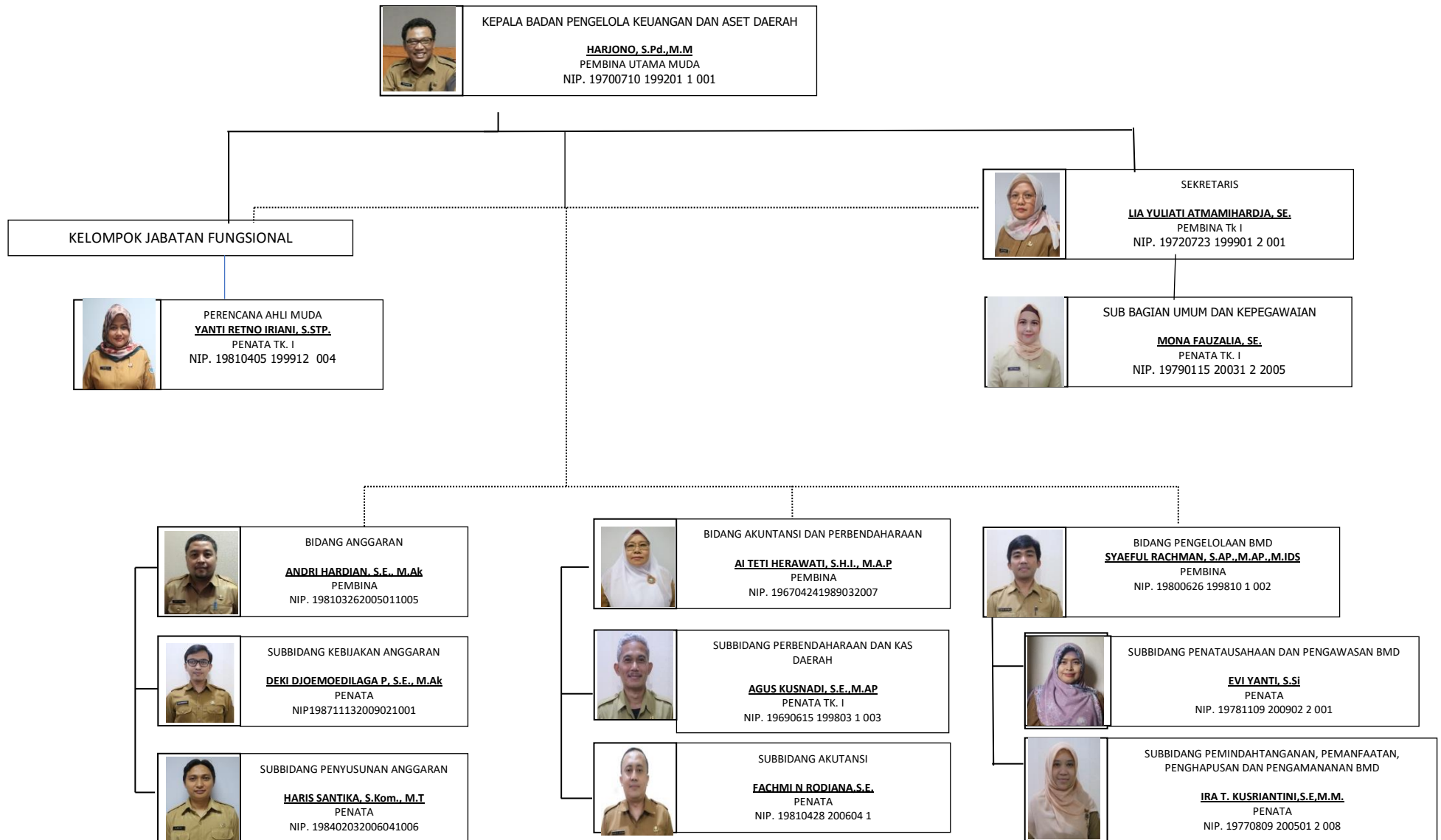
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Magister / S2	11 Orang
Sarjana / S1	18 Orang
Diploma /D3	5 Orang
SLTA / Sederajat	3 Orang

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 18 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 11 orang serta D-III sebanyak 5 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 3 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 29 orang atau 78,3 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2023. Tetapi dilihat dari jumlah pegawai masih dinilai kurang dilihat dari susunan analisis jabatan yang ada.

Selain pegawai dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan dan mesin berkondisi baik yang dimiliki.

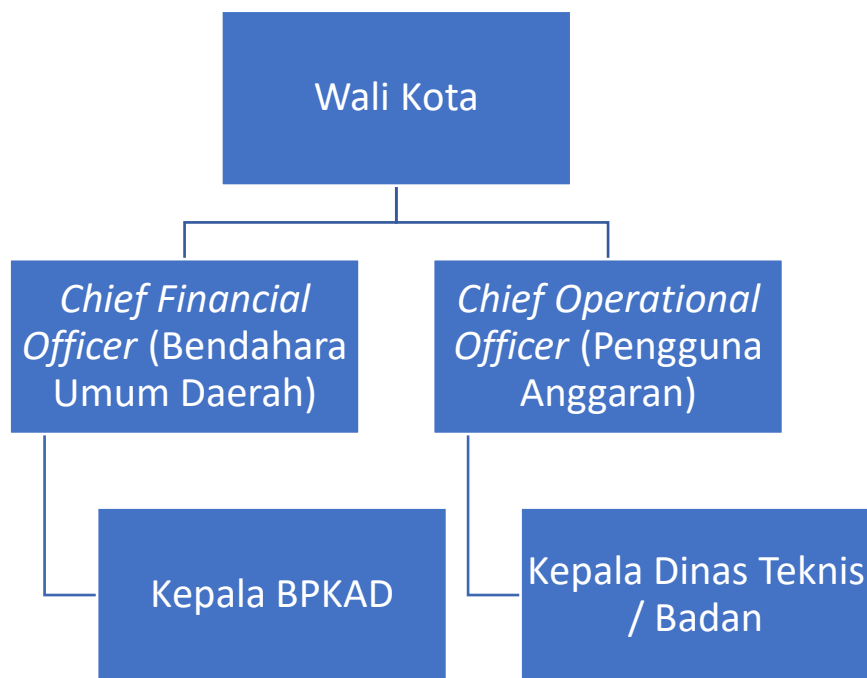
Gambar 1.2 Struktur Organisasi



### 1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.



Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Adapun Misi yang tercantum dalam RPJPD untuk periode 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Terkait dengan misi, urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya

Manusia;

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Dalam RPD 203-2026 Kotra Cimahi BPKAD masuk kedalam tujuan kota nomor 3 meningkatkan tata Kelola pemerintahan dengan sasaran Opini BPK.

Selain itu dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD. Isu-isu strategis BPKAD untuk tahun 2023, yaitu :

1. Penggunaan SIPD sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan);
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan terbaru;
3. Pengamanan terkait aset-aset Pemerintah Kota Cimahi;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi BMD menggunakan aplikasi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis diatas adalah :

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIPD;
2. Adanya pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD;
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sertifikasi tanah dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Persegi dan Grafis serta Pelaksanaan sensus barang (KIB C dan D) pada tahun 2023;
5. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset;

Kemudian dalam rangka mempertahankan Opini WTP Pemeriksaan BPK RI 10 kali berturut-turut, BPKAD memiliki tantangan berupa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SIPD Aklap yang masih dalam proses pengembangan. Upaya yang dilakukan dengan meminta pendampingan kepada tenaga ahli SIPD Aklap Provinsi

Jawa Barat dari sisi kebutuhan data yang dibutuhkan bersumber dari SIPD.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, Pada Bab ini diuraikan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2023;

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2023;

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Proses perencanaan BPKAD haruslah searah dan sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan dari Kota Cimahi baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJP Kota Cimahi berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menentukan visi, misi, dan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perencanaan Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2023 merupakan indikator kinerja yang mengaju kepada RPD 2023-2026 yang telah ditetapkan, sehingga pada anggaran perubahan tahun 2023 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPD yang baru.

Indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 pada Tahun 2023 terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator.

#### **IKU**

#### **IKU**

**Hasil Penetapan RPD 2023-2026 Berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD Tepat Waktu 2. Presentase Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Rasio Utilisasi Aset

## 2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi yang tercantum pada RPD.

Visi Kota Cimahi yaitu “Cimahi Kota Cerdas”. Dengan penjelasan bahwa:

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari

- **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
- **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

BPKAD menjalankan visi Wali kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

## 2.2 Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026. Pada dasarnya penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 9 program

prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

### 2.3 Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023. Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2023 – 2026 adalah :

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Teroptimalisasi kualitas	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran

	s tata kelola keuan gan daerah	Milik Daerah							
			2. Presentase Penyusun an Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerinta han	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Akuntans i dan Perbenda haraan
			3. Rasio Utilisasi Aset	40 %	50 %	60 %	70 %	72 %	Bidang Pengelola an Barang Milik Daerah

Selain keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja dalam pencapaian target BPKAD tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kerjasama baik internal antar bidang maupun eksternal dari perangkat daerah. Oleh karena itu crosscutting dalam pencapaian target BPKAD dapat dilihat pada :

Tabel 2.2  
Crosscutting Kinerja BPKAD

No	Target Kinerja	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	
			Internal BPKAD	Eksternal
1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penyusunan KUA-PPAS menunggu RKPD ditetapkan	Sub bidang Kebijakan Anggaran dan Sub bidang	Bappelitbangda

			Penyusunan Anggaran	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan laporan keuangan tingkat kota yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Perangkat Daerah	Sub bidang Akuntansi dan Sub bidang Perbendaharaan	Seluruh Perangkat Daerah
3	Rasio Utilisasi Aset	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub bidang Penatausahaan dan Pengawasan, Sub bidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengamanan BMD dan Sub bidang Akuntansi	Seluruh Perangkat Daerah

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian Laporan	100%

		Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
		Rasio Utilisasi Aset Daerah	72%

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Tabel 2.4

Renja BPKAD Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja  Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			49.594.622.00 0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.279.290.73 0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	100%	31.845.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	23.115.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	8.730.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran dan ASN yang mendapatkan pelayanan	100%	18.102.064.998
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	42 Orang	18.094.622.998
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.440.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	3.002.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Sosialisasi yang dilaksanakan	100%	10.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah yang diberikan	100%	1.714.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.714.500
Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum yang diberikan	100%	738.195.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	159.184.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	53.772.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 paket	27.069.800

		Penggandaan yang Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	373.362.900
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	85.707.000
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	39.150.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	332.148.502
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	332.148.502
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	100%	20.516.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.116.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	216.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 kendaraan R2 dan 9 Kendaraan R4	216.500.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			28.341.37.100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.291.637.100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	88.599.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	76.963.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	232.660.200
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	292.262.400
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Aplikasi	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen Perda 1 dokumen Perwal Penjabaran APBD	100.128.600
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen Perda 3 dokumen Perwal Penjabaran APBD	99.192.200
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen (SE Pedum)	142.609.500
	Jumlah laporan Fasilitasi kebijakan Regulasi Penganggaran		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 dokumen	76.176.400
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 dokumen	70.076.400

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	69.546.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	450.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 dokumen (RKUD)	58.613.200
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240 dokumen (SPD)	32.727.800
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 dokumen	37.331.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 laporan	38.478.900

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 BA (Rekon Penerimaan dan Pengeluaran)	35.673.300
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	86.447.600
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	160.728.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	850.000.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- 20 dokumen (dok pendukung lap bulanan, triwulan, semesteran) - 1 dokumen (rekon) - 1 data valid (validasi transaksi pendapatan dan belanja)	34.677.800
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- 1 laporan (analytical Reviuw Lap Keuangan) - 2 laporan (lap.keu pemda)	467.438.600
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- 1 dokumen Rancangan PP APBD TA 2020 - 1 dokumen Rancangan Penjabaran PP APBD TA 2020	71.823.400

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- 1 dokumen (Tinjut LHP BPK) - 1 kasus (kasus kerugian daerah yang terselesaikan pada th berjalan)	36.442.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen (modul kebijakan akuntansi/sistem akuntansi pemda)	69.308.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen (SOP Penyusunan Laporan Keuangan)	61.810.200
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang	53.268.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 BLUD	28.747.200
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan statistik Pemda	26.484.0000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Belanja Bunga dan Belanja Tidak Terduga	100%	25.500.000.00 0
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	500.000.000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	1 Laporan	25.000.000.0 00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Persentase Keteraksesan Aplikasi SIPD	100%	250.000.000

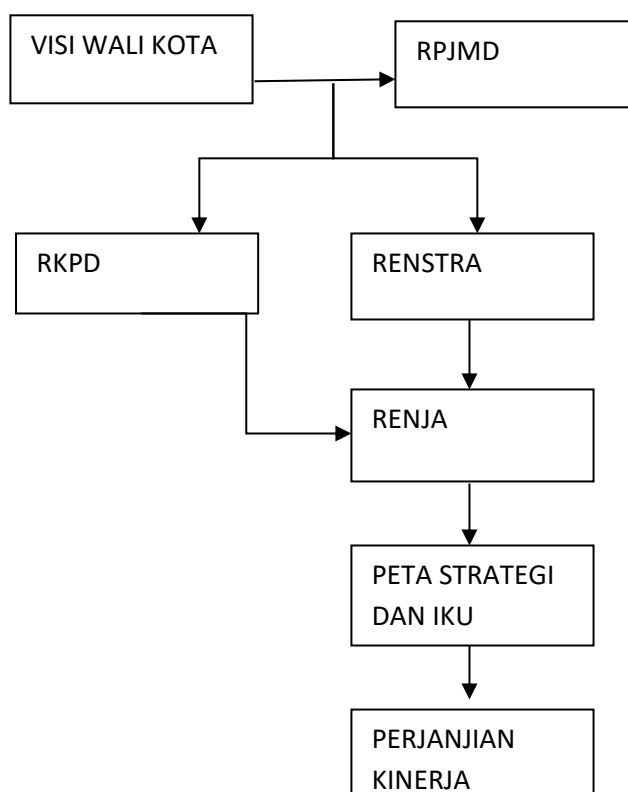
Keuangan Daerah			
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	30 SKPD	250.000.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset	70%	1.800.000.000
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen (SSH)	175.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.000.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen (Raperwal kebijakan BMD)	25.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	220.000.000
	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	15 Laporan	750.000.000
	Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	150.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	25.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan	5 Dokumen	150.000.000

	penghapusan barang milik daerah		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	15.000.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2023.

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
	2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100 %
	3. Rasio Utilisasi Aset	72 %

Perjanjian kinerja dibuat setelah RKA dan DPA ditetapkan karena di dalam perjanjian kinerja tercantum anggaran dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan dalam pencapaian target. Rencana Kerja Anggaran (RKA) telah diselaraskan dengan rencana kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Tercantum 3 Program 14 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang telah selaras dari rencana kerja, RKA dan DPA pada tahun 2023.

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6  
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2023.

Program	Anggaran (Rp)	Target
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.714.558.311</b>	<b>100%</b>
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>14.267.740.956</b>	<b>100%</b>
<b>Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.851.371.500</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>28.833.670.767</b>	<b>100%</b>

Selain itu sebagai tindaklanjut dari program dan kegiatan yang disusun, BPKAD Kota Cimahi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Rencana aksi memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan baik dari segi program, kegiatan hingga subkegiatan. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan pertriwulan oleh Kepala BPKAD melalui rapat kerja internal per triwulan. Berikut rencana aksi BPKAD Tahun 2023 :

TABEL 2.7

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET						
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV							
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13				14						
	MENINGKATNYA KUALITAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BPKAD	60.0 Nilai				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		2	2	7 dokumen (RKA, RKA-P, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan, Forum OPD)					
Nilai IKM Perangkat Daerah									80.75 Nilai										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1			2 dokumen (LKIP dan SKM)	
																			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	3	3	3	3	36 orang Pegawai (14 bulan Gaji) (12 bulan tunjangan kinerja objektif lainnya, JKK, JKM, HPJS)
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1				1 dokumen (Laporan Tahunan)
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			1		1 dokumen (semesteran)
																			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	4 laporan stock opname
														Indeks Profesionalitas ASN			50.0 Nilai		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhnya Pengelolaan Kepegawaian di BPKAD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	orang		55			55 orang pegawai BPKAD
																					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3				3 paket
																					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3	3	3	3	paket=bulan (12 paket)
																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan organisasi perangkat daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1				1 paket
																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3	3	3	12 laporan
																					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	3	3	3	3	12 dokumen
																					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1				1 dokumen
																			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2			2 unit
																			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang organisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	3	3	12 laporan
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	3	3	12 bulan							
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	4	1	11 unit (R2 9 unit ; R4 3 unit)							

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV	
1																						
		1. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu				100%		Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu				100%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	dokumen		30	30		30 SKPD (2 kegiatan) = 60 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		30	30		30 SKPD (2 kegiatan) = 60 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen	30				30 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen				30	30 dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2			2	4 dokumen (2 Perda dan 2 Perwal APBD)
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen		1	1	2	4 dokumen (2 Perda dan 2 Perwal APBD)
															Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	1			1	2 laporan
															Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	1	1	1	1	4 dokumen
															Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen		2	2		4 dokumen
															Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		40	40		80 orang
															Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	3	3	3	3	12 dokumen
															Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	120		120		240 Dokumen
															Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen				5	5 dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	3	3	3	3	12 Laporan

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV		
																							11
1	OPTIMALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)				100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu				100%	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	40	40	40		120 dokumen
10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen				1			1 dokumen											
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	100				100		200 orang											
			11	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen			20						20 dokumen								
12				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan				1	1				2 laporan								
				13	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Dokumen			2				2 Dokumen							
14					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			dokumen		1					1 dokumen							
				15	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Dokumen			1				1 dokumen							
16					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			dokumen			1				1 dokumen							
				17	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			orang		30					30 orang							
18					Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			lembaga	15						15 lembaga/ BLUD							
				19	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota			laporan			1				1 laporan							
20					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan	1				1		2 laporan						
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		laporan					1				1 laporan								

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN				SATUAN	TARGET				KET									
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021	I	II		III	IV												
																						12	13				14						
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10				11	12	13				14								
													Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Lingkup Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1					1	1 dokumen							
		<b>3.Rasio Utilisasi Aset</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Pelaporan BMD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan BMD	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		1	1							2	2 Dokumen					
																			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	1					2	2 Dokumen		
																			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen		1	1							2	2 dokumen	
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	1	1	1	1						4	4 laporan	
																			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan			1	1						2	2 laporan	
																			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	5	5	5								15	15 laporan
																			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan		1	1	1							3	3 laporan
																			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan		1	1	1							3	3 laporan
																			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	1	1	1	2							5	5 dokumen
																			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	1	1	1	1							4	4 laporan
														Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	30	110		60							200	200 orang					

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan pertriwulan dievaluasi dan dibahas terkait kendala-kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal serta solusi bersama dari setiap permasalahan.

BPKAD pada tahun 2022 telah menyusun LKIP yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi. Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2022 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 80,80 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>40</b>	<b>32,80</b>	<b>82,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>40</b>	<b>32,00</b>	<b>80,00</b>
<b>C.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>16,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80,80</b>	<b>80,80</b>

Mengacu kepada hasil review oleh Inspektorat, maka nilai terendah berada pada aspek pelaporan kinerja yaitu hanya 16 dari kemungkinan total 20 atas poin tersebut, Adapun catatan yang perlu diperbaiki atas poin tersebut yaitu menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, oleh sebab itu hal ini menjadi faktor yang BPKAD perbaiki pada Tahun 2023.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2023 - 2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

##### **A. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

##### **B. Indikator Sasaran Strategis**

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKAD telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap Sasaran Strategis, semakin besar *coverage* IKU terhadap Sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis semakin bersifat

aktivitas. Berikut keterkaitan IKU BPKAD dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dari Utama	Ket
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD tepat Waktu	Ukuran Penetapan APBD dilihat dari Rangkaian Tanggal Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Ukuran Persentase Laporan Keuangan dilihat dari Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan perangkat daerah kepada BPKAD secara tepat waktu dan sesuai SAP.
			Rasio Utilisasi Aset	Rasio Utilisasi Aset diukur berdasarkan jumlah nilai rata-rata capaian kinerja Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.

### 3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jawaban dari perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan supervisi pimpinan sebagai controlling dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kinerja BPKAD dilaksanakan secara berkala per 3 bulan. Kepala BPKAD memimpin rapat evaluasi dengan melihat rencana aksi dan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan melihat capaian kinerja yang dicapai baik pada tahun jalan ataupun terhadap renstra BPKAD dan juga terkait kendala-kendala yang dapat menghambat capaian kinerja.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, BPKAD menyusun laporan kinerja tahunan 2023 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan target IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
2.		Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%	
3.		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	72 %	71,83 %	99,76 %	
<b>Rata - Rata Capaian</b>						<b>99,92 %</b>

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 99,92 % atau bermakna sangat berhasil, dalam pencapaian sasaran strategis ini BPKAD mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel di atas. Berikut penjabaran hasil dari masing-masing indikatornya :

#### **1. Penyusunan APBD yang tepat waktu**

Dalam proses penyusunan APBD, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah dengan 11 sub kegiatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 1.315.063.195

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.286.657.969 atau 97,84% dan capaian fisik sebesar 100% yang dimana keseluruhan sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan APBD Kota Cimahi tepat waktu.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 105 ayat 3c disebutkan bahwa Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama (1) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada prinsipnya kinerja penyusunan APBD selama tahun 2023 adalah proses penyusunan APBD untuk Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2024, maka berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun oleh BPKAD :

Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi

NO	URAIAN	ATURAN	REALISASI 2023	KETERANGAN
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II Juli	12 Juli 2023	Sesuai
2	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II Agustus	9 Agustus 2023	Sesuai
3	Kesepakatan antara Wali Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi atas Rancangan PPAS	Minggu II Agustus	9 Agustus 2023	Sesuai
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota Cimahi Kepada DPRD Kota Cimahi	Paling lambat minggu IV Bulan September	12 September 2023	Sesuai
5	Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran	29 November 2023	Sesuai

6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD untuk di evaluasi	3 hari setelah persetujuan bersama	1 Desember 2023	Sesuai
7	Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD	15 Hari Kerja	22 Desember 2023	Sesuai
8	Penyempurnaan Rancangan Perda APBD sesuai evaluasi	7 hari kerja setelah evaluasi	27 Desember 2023	Sesuai
9	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perdat APBD kepada Gubernur	3 Hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD	28 Desember 2023	Sesuai
10	Penetapan Perda APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	Paling lambat 31 Desember	29 Desember 2023	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama penyusunan APBD tahun anggaran 2024, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang perencanaan anggaran dan aset yang membantu Kepala BPKAD untuk mencapai kinerja penetapan APBD tepat waktu. Pada poin ke 5 proses penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai jadwal dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 29 November 2023, dimana batas maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir serta pada poin ke 10 dalam hal penetapan APBD yang dapat ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 atau sebelum tahun anggaran APBD itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2024, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

## **2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Dalam pencapaian target persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP, BPKAD memiliki 2 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan serta Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 sub kegiatan dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.146.649.200 dengan capaian realisasi Rp. 999.800.921 atau 87,19 % serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.

Kerjasama dari kedua sub bidang perbendaharaan dan akuntansi merupakan 2 komponen yang tidak terpisahkan. Sub bidang Perbendaharaan mengawasi agar pelaksanaan penatausahaan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan sub bidang akuntansi menerima hasil penatausahaan dan dilakukan pencatatan jurnal-jurnal transaksi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, sub bidang perbendaharaan dibantu dalam penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD sebagai sistem informasi yang dibangun oleh Kemendagri yang dimana alur proses penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020. Sub Bidang Perbendaharaan bertugas memverifikasi berkas yang masuk terkait kesesuaian bukti-bukti transaksi. Begitu juga Sub Bid Akuntansi dalam pencatatan jurnal dibantu menggunakan SIPD Aklap dimana data yang diperoleh merupakan data transfer dari SIPD Penatausahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum serta Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Unit yang mempunyai fungsi bendahara umum di Kota Cimahi adalah BPKAD selaku SKPKD, sehingga para perangkat daerah hanya diwajibkan menyampaikan lima buah laporan yang selanjutnya harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar Perangkat Daerah yang telah menyajikan Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan

<b>No.</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Penyajian Laporan Keuangan</b>
1.	Dinas Pendidikan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
2.	Dinas Kesehatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
3.	RSUD Cibabat	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
10.	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
14.	Dinas Perhubungan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
15.	Dinas Komunikasi, informatika,	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

16.	Dinas Arsip Daerah	
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
19.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
22.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
24.	Sekretariat Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
25.	Sekretariat DPRD	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
26.	Inspektorat Kota	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
27.	Kecamatan Cimahi Utara	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
28.	Kecamatan Cimahi Tengah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
29.	Kecamatan Cimahi Selatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
30.	Kantor Kesatuan Bangsa	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dari 30 perangkat daerah di Kota Cimahi telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2023 sesuai dengan SAP 71 tahun 2010, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang akuntansi dan perbendaharaan yang membantu Kepala BPKAD untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerja.

### **3. Rasio Utilisasi Aset**

Dalam pencapaian target Rasio Utilisasi Aset, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.851.371.500 dengan capaian realisasi Rp. 1.741.658.161 atau 94,07 % serta capaian

realisasi fisik 100% yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.

Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumberdaya. Aset sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis *highest and best use principle*. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal, aspek kelayakan fisik, aspek kelayakan finansial dan produktivitas maksimal.

Untuk memastikan utilisasi atas aset daerah berjalan dengan optimal maka ditetapkanlah IKU Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data pada LKPD, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah serta menghilangkan *opportunitiy loss* atas aset tersebut. Ruang lingkup utilisasi aset yang diukur pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Utilisasi Aset Tetap

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utiliasasi	Objek Pengukuran
1	Pemanfaatan	A.Sewa	Nilai Aset yang disewakan
		B.Kerja sama Pemanfaatan	Nilai Aset yang di KSP kan
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	Nilai Aset yang BGS kan
		D.Bangun Serah Guna (BSG)	Nilai Aset yang BSG kan
		E. Pinjam Pakai	Nilai Aset dipinjampakaikan
2.	Penetapan Status Penggunaan	A. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya
		B. Penetapan status	Nilai Aset yang ditetapkan status

		penggunaannya karena hibah masuk	penggunaannya karena hibah masuk
		C. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	Nilai Aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Aset yang dihibahkan
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset	Nilai aset baru hasil tukar menukar

Target IKU tahun 2023 ditetapkan sebesar 72%, hal ini berarti 72% dari total aset tetap dan aset tetap lainnya yang dimiliki daerah harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada laporan Barang Milik Daerah, yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 3.6  
Daftar Aset Tetap Per SKPD  
Tahun 2023 (Unaudited)

No	SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	62.055.425.372	84.771.274.164	233.217.547.753	599.205.674	51.537.102.667	964.717.196	433.145.272.827
2	DINAS KESEHATAN	7.870.642.001	51.300.918.263	52.192.473.370	898.890.120	61.713.000	-	112.324.636.754
3	RSUD CIBABAT	28.362.300.000	278.621.045.253	130.297.688.373	7.127.838.639	12.025.600	-	444.420.897.865
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	666.404.861.656	11.678.049.455	80.711.377.263	580.353.934.339	534.085.000	92.569.758.195	1.432.252.065.908
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	127.698.970.377	14.707.681.481	39.257.372.437	157.102.535.161	16.370.719.815	258.145.030	355.395.424.301
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	16.462.668.709	1.800.860.743	-	97.119.000	-	18.360.648.452
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.991.693.468	-	-	9.800.000	-	3.001.493.468
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	4.435.698.824	645.033.000	-	3.999.381	-	5.084.731.205
9	DINAS SOSIAL	-	1.993.673.274	-	-	-	-	1.993.673.274
10	DINAS TENAGA KERJA	-	1.911.424.100	-	-	5.790.000	-	1.917.214.100
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14.252.840.000	4.738.182.276	12.597.534.586	4.149.277.550	270.975.000	-	36.008.809.413
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.755.801.960	54.030.695.759	12.125.210.204	5.522.787.791	8.800.000	49.225.000	93.492.520.714
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.800.105.200	41.036.000	186.635.000	48.674.800	-	10.076.451.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.319.000.000	41.037.017.160	14.101.060.100	73.575.945.675	3.765.000	-	137.036.787.935
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	10.347.469.597	1.080.744.408	220.487.300	-	33.347.214	11.682.048.519
16	DINAS ARSIP DAERAH	98.000.000	2.324.334.729	1.533.652.000	-	1.557.266.706	-	5.513.253.435
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	9.272.750.000	15.203.198.415	161.595.309.924	1.574.060.725	364.050.825	-	188.009.369.889
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	7.084.389.618	96.402.050.874	-	4.440.000	23.992.481.800	127.483.362.292
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	34.965.982.450	2.397.922.526	17.457.752.657	-	245.025.000	79.619.856	55.146.302.489
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	4.072.893.769	-	-	9.800.000	-	4.082.693.769
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	10.144.789.481	-	-	226.000.000	-	10.370.789.481
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	5.448.363.578	167.033.430	-	91.863.000	-	5.707.260.008
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	-	2.396.481.604	-	-	-	-	2.396.481.604
24	SEKRETARIAT DAERAH	6.164.015.740	33.080.369.307	58.328.132.188	175.060.800	500.749.922	-	98.248.327.957
25	SEKRETARIAT DPRD	2.756.775.000	18.203.640.661	12.468.490.134	-	2.261.194.720	-	35.690.100.515
26	INSPEKTORAT KOTA	-	2.676.844.190	4.542.127.425	-	-	-	7.218.971.615
27	KECAMATAN CIMAHU UTARA	10.479.245.000	5.625.449.646	6.539.117.500	49.558.364	7.792.489	-	22.701.162.999
28	KECAMATAN CIMAHU TENGAH	10.039.095.128	9.581.812.579	10.749.085.581	21.263.637	3.896.246	-	30.395.153.171
29	KECAMATAN CIMAHU SELATAN	13.463.905.000	8.163.433.659	6.888.244.521	189.574.685	9.812.492	-	28.714.970.357
30	KESBANGPOLL	2.075.500.000	1.155.725.119	-	-	3.446.000	-	3.234.671.119
	JUMLAH	1.026.035.109.684	716.387.245.864	954.738.934.472	831.747.055.460	74.249.906.662	117.947.294.291	3.721.105.546.433



Tabel 3.8  
Perhitungan Rasio Utilisasi

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN UTILISASI ASET  
TAHUN ANGGARAN 2023**

	INDIKATOR	TA 2023	KETERANGAN
1	<b>PENATAUSAHAAN BMD</b>		
	Indikator: Laporan Rekonsiliasi BMD dan Penetapan Status Pengguna BMD 2023	100%	
2	<b>PEMANFAATAN BMD</b>		
	Indikator: Potensi BMD yang akan dimanfaatkan (17 area)	178.539.066.820,33	Sewa di area Pemkot , Sewa di area Kantor DPRD , Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin Sekolah, GOR Sangkuriang, BBI, Gor LKMD, Lapangan Cibaligo, Lapangan Poral, SMP PGRI, Area di Jalan Kapten Iskak, Area di Jalan Warung Contong, Sewa di Area MPP, Sewa aula Kel/Kec)
	BMD yang telah dimanfaatkan (8 area dari target 17 area)	47%	Sewa Lahan dan Gedung di area Pemkot (BJB), Sewa Lahan di area Kantor DPRD (ATM BJB dan Tower Telekomunikasi), Sewa sebagian bahu jalan, BGS Cimahi Mall, Sewa area Kantor Penimbangan Dishub, Kantin Sekolah, GOR Sangkuriang)
3	<b>PENGAMANAN BMD</b>		
	Target sertifikasi (a)	472	
	Realisasi sertifikasi (b)	265	
	Proses sertifikasi (sudah masuk BPN) ( c )	58	
	(b+c)/a	0,68	
	%	68%	
	Ratio Utilisasi aset (1+2+3)/3	0,7183	
	(%)	71,83%	

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa ratio utilisasi aset Pemerintah Kota Cimahi ada pada angka 71,83% yang berarti kurang sebesar 0,17% dari target yang ingin dicapai sebesar 72% sesuai tercantum pada Renstra BPKAD 2023-2026. Tidak maksimalnya capaian disebabkan oleh beberapa hal, pada pemanfaatan BMD dikarenakan pengguna barang di Perangkat Daerah tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk aset yang belum disertifikasi, BPKAD sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung administrasi dalam proses pembuatan sertifikat.

Sesuai perhitungan rasio utilisasi aset sebesar 71,83 % dengan target pencapaian sebesar 72% sesuai tercantum pada Renstra BPKAD 2023-2026. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023 :

Tabel 3.8  
Perbandingan antara target dan realisasi Rasio Utilisasi  
Aset Tetap

<b>Tahun Anggaran 2023</b>			
Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
72 %	72 %	71,83 %	99,76%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran BPKAD tahun 2023 yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar % yang berada di interval  $X > 85$  atau bermakna sangat berhasil.

### **3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPKAD, selain itu penting bahwa penetapan target dilandasi faktor SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), sehingga target bukan semata-mudah untuk di capai tapi akan dicapai dengan beberapa tantangan demi kemajuan organisasi. Pada prinsipnya Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD 2023-2026, pada bagian ini dijelaskan beberapa analisa sederhana mengenai beberapa perbandingan pencapaian target pada tahun ini hingga berakhirnya target akhir rencana strategis BPKAD.

#### **3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan**

Analisis atas capaian indikator kinerja atas sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap	70 %	71,83 %	99,76 %

Tabel 3.10

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

<b>Penjelasan Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah</b>		
<b>Penyusunan APBD yang tepat waktu</b>	<b>Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan</b>	<b>Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah</b>
Target yang ditentukan yaitu tanggal persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Tanggal Penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2024.	Target yang ditentukan yaitu 100 % atau seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	Target yang ditentukan yaitu 72 % dari total aset tetap yang sesuai laporan barang milik daerah.
Permasalahan :	Permasalahan :	Permasalahan :

<p>1. Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD. Permasalahan utama dalam menyusun dokumen RAPBD dan APBD adalah kecepatan perangkat daerah dalam proses sinkronisasi data, dikarenakan RAPBD merupakan kumpulan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh perangkat daerah yang telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD</p> <p>2) Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2023, Kota Cimahi telah</p>	<p>1. Pada dasarnya penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah harus disiapkan oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing perangkat daerah, dari total 30 (tiga puluh) perangkat daerah mayoritas PPK bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi.</p> <p>2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2023, Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut</p>	<p>1. Kekurangpahaman para pengurus barang dalam menyusun dokumen laporan inventarisasi barang daerah</p> <p>2. Keterbatasan SDM yang dapat menguasai teknologi dalam inventarisasi aset di Kota Cimahi</p> <p>3. Keterlambatan belanja modal yang selalu dibelanjakan pada akhir tahun di hampir seluruh SKPD.</p> <p>4. Beberapa faktor external seperti proses jangka waktu yang cukup lama untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota</p> <p>5. Ketersediaan tim penilai barang milik daerah dari kementerian keuangan yang menunggu antrian karena keterbatasan SDM yang ada</p> <p>6. Penggunaan barang yang belum dapat memaksimalkan potensi pemanfaatan asetnya.</p>
--	--	---

menetapkan APBD secara tepat waktu. 3. Keterlambatan Penetapan RKPD 4. Keterlambatan Penetapan Pedoman Umum Penyusunan APBD.	harus tetap dipertahankan. 3. SIPD Penatausahaan dan Aklap yang masih dalam pengembangan.	
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat penyusunan APBD secara tepat waktu : 1. Dalam upaya percepatan penyusunan Rancangan APBD, maka BPKAD menggunakan strategi komunikasi dan koordinasi secara intens dengan sifat menjemput bola ataupun permasalahan ke masing-masing perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam konsolidasi penyusunan RAPBD hingga APBD 3. Komunikasi dan koordinasi secara	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan para perangkat daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga banyak proses yang dapat diotomatiskan, yang sebelumnya telah terverifikasi penggunaan sistem tersebut oleh Bidang Akuntansi di BPKAD 2. Mengadakan Pelatihan SIPD Penatausahaan dan Aklap 3. Membuka pelayanan konsultasi terkait pengelolaan	Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset di Pemerintah Kota Cimahi : 1. Mengadakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi aset daerah yang disusun mandiri oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pelatihan dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi 3. Menerbitkan surat edaran terkait belanja di akhir tahun 4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal 5. Sosialisasi berkala terkait pemanfaatan BMD

intensif dengan pihak penyusun RKPD Komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri	dan pelaporan keuangan daerah	
---	-------------------------------	--

### 3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Lalu

Terdapat perbedaan sasaran serta tolak ukur indikator kinerja BPKAD pada tahun 2019-2023, hal ini dapat tergambar ke dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	40	50	60	70	72	55,91	66,5	66,7	99,33	71,83	71,83	100%

Mengacu kepada tabel di atas, pencapaian target kinerja dari BPKAD selama 5 tahun selalu mencapai target. Pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran Perangkat Daerah yang telah mengumpulkan data ataupun laporan yang menunjang capaian kinerja BPKAD. Pembinaan, koordinasi, konsultasi, pelatihan dan penyusunan SOP atau Sistem dan prosedur merupakan beberapa bentuk cara dari BPKAD memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah.

### 3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Analisis atas capaian indikator kinerja terhadap target akhir pencapaian sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

## Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Capaian Tahun-N Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	71,83 %	72 %	93,89 %

Berdasarkan data di atas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2023 ini, dari 3 (tiga indikator) yang mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, ketiga indikator telah tercapai sesuai target. Realisasi pencapaian akhir target pada indikator penyusunan APBD yang tepat waktu dan presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta rasio utilisasi aset pada akhir tahun dalam renstra telah tercapai.

### 3.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKAD selama tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13

## Daftar Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan BMD	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu (100)	97,84%	2,16%
		Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	87,19%	12,81%
		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	99,92	94,07 %	5,93%

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing dari indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari tiga indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja BPKAD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, berikut merupakan tabel pemetaan kegiatan yang ada di BPKAD :

Tabel 3.14

## Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan BPKAD

Bidang	Total Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
<b>Sekretariat</b>	<b>9 Kegiatan</b>	<b>13.392.580.691</b>	<b>9.117.039.954</b>	<b>68,07%</b>	<b>31,93%</b>
<b>Perencanaan Anggaran dan Aset</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1.315.063.195</b>	<b>1.286.657.969</b>	<b>97,84%</b>	<b>2,16%</b>
<b>Akuntansi dan Perbendaharaan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>1.146.649.200</b>	<b>999.800.921</b>	<b>87,19%</b>	<b>12,81%</b>
<b>Pengelolaan BMD</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1.851.371.500</b>	<b>1.741.658.161</b>	<b>94,07%</b>	<b>5,93%</b>
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>11.128.006.211</b>	<b>3.006.837.758</b>	<b>27,02%</b>	<b>72,98%</b>
<b>JUMLAH BPKAD</b>	<b>14 Kegiatan</b>	<b>28.833.670.767</b>	<b>16.151.994.763</b>	<b>56,02%</b>	<b>43,98%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi dan tingkat efisiensi belanja dari tiap bidang cukup baik, hanya saja pada sekretariat penyerapan anggaran masih terlihat besar dikarenakan terdapat anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan terdapat anggaran antisipasi pembayaran TAPERA untuk seluruh ASN Pemerintah Kota Cimahi yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan petunjuk teknis yang belum dapat dipastikan dan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya berdasarkan keadaan darurat, keperluan mendesak, bantuan sosial tidak terencana dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BPKAD Kota Cimahi telah berupaya berkoordinasi dengan BP TAPERA terkait juknis pencairan tetapi masih belum mendapatkan informasi ataupun dasar yang kuat untuk pembayaran TAPERA. selain itu BPKAD Kota Cimahi telah menyusun Perwal dan SOP terkait penggunaan BTT sehingga dapat memudahkan Perangkat Daerah untuk mengajukan penggunaan dana BTT.

### **3.3.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPKAD selama tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Daftar Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

<b>Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan</b>	<b>Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan</b>
1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-
2.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-
3.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-
4.Pengelolaan Barang Milik Daerah	-

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berdampak akan pencapaian kinerja diantaranya terdapat di masing-masing bidang seperti kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang dimana kegiatan tersebut memiliki 11 sub kegiatan yang saling berkesinambungan dalam pencapaian penetapan APBD tepat waktu yang memiliki target utama dokumen penetapan APBD. Selain itu terdapat 2 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari 16 sub kegiatan yang didalamnya terkait penunjang utama dari segi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang memiliki tujuan 1 Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dari bidang pengelolaan BMD terdapat kegiatan pengelolaan BMD yang terdiri dari 7 sub kegiatan yang saling berhubungan dalam perhitungan rasio utilisasi aset di Pemerintah Kota Cimahi.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2023 jenis belanja pada BPKAD Kota Cimahi terdiri belanja operasional, belanja modal belanja transfer dan belanja tidak terduga yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pagu Anggaran total BPKAD Kota Cimahi adalah 28.833.670.797 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Nilai ini menurun jika dibandingkan pada Tahun 2022 BPKAD memiliki anggaran sebesar 50.649.837.030 (Lima Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah). Pencapaian realisasi sebesar 12.638.294.105 atau 73,55 % untuk belanja operasional, Rp. 506.862.900 atau 97,13 % untuk belanja modal dan 3.006.837.758 atau 21,5% untuk belanja tidak terduga.

### 3.4.1 Belanja Operasional

Pagu Anggaran Belanja Operasional BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 17.183.841.256, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.638.294.105 atau 73,55 %. Belanja operasional yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel rincian berikut ini :

Tabel 3.16

Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2023

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Pencapaian %
		Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.714.558.311	8.807.416.673	69,27%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.267.740.956	5.602.919.929	39,27%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.851.371.500	1.741.658.161	94,07%
Jumlah		<b>28.833.670.797</b>	<b>16.151.994.763</b>	<b>56,02%</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi terlihat rendah dikarenakan capaian dari kegiatan administrasi keuangan daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan terdapat anggaran TAPERA yang tidak dapat direalisasikan. Selain itu pada program pengelolaan keuang daerah sub kegiatan pengelolaan dana darurat mendesak yang berisikan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

### **3.4.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pada Tahun Anggaran 2023 di BPKAD Kota Cimahi menganggarkan belanja modal (sesuai anggaran perubahan) sebesar Rp. 521.823.300, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 506.862.900 atau 97,13%. Belanja modal yang dilaksanakan oleh BPKAD meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

### **3.4.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh APBD Tahun 2023 Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 11.128.006.211, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.006.837.758 yang dipergunakan untuk penanggulangan keracunan masal, darurat sampah dan pengembalian bantuan keuangan provinsi selama tahun 2023.

### **3.5 Evaluasi Kinerja**

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan/target dibutuhkan evaluasi untuk melihat sejauh apa keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Evaluasi kinerja membantu memahami kendala-kendala dalam pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan perbaikan dan tujuan dapat tercapai sesuai target.

BPKAD Kota Cimahi pada tahun 2023 melaksanakan evaluasi kinerja per bulan dengan melihat realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi e-reporting. Realisasi fisik dan keuangan pada e-reporting

dapat menggambarkan pencapaian realisasi keuangan dan fisik yang dibandingkan dengan perencanaan per bulan yang didasarkan pada anggaran kas pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.17  
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : AGUS KUSNADI, S.E., TK : M.A.P.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>346.351.000,00</b>	0,00	<b>346.351.000,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>257.309.320,00</b>	<b>74,29</b>	<b>74,29</b>		
		1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24.391.600,00	0,00	24.391.600,00	100,00	100,00	18.198.400,00	74,61	74,61	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.275.600,00	0,00	31.275.600,00	100,00	100,00	24.631.350,00	78,76	78,76	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35.818.300,00	0,00	35.818.300,00	100,00	100,00	26.912.000,00	75,13	75,13	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.008.900,00	0,00	36.008.900,00	100,00	100,00	15.168.950,00	42,13	42,13	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : AGUS KUSNADI, S.E., TK : M.A.P.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>346.351.000,00</b>	0,00	<b>346.351.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>257.309.320,00</b>	<b>74,29</b>	<b>74,29</b>		
		5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.219.500,00	0,00	33.219.500,00	100,00	100,00	13.968.150,00	42,05	42,05	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	56.260.300,00	0,00	56.260.300,00	100,00	100,00	45.673.070,00	81,18	81,18	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
		7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	129.376.800,00	0,00	129.376.800,00	100,00	100,00	112.757.400,00	87,15	87,15	Tidak ada kendala yang menghambat kegiatan semua masih dapat diatasi	

												dan dijalankan dengan baik	
	PP : MONA FAUZALIA, S.E. TK												
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.701.869.302,00</b>	51,11	<b>1.701.869.302,00</b>	<b>100,0 0</b>	100,0 0	<b>1.576.823.305,00</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>			
		8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.671.400,00	100,0 0	45.671.400,00	100,0 0	100,0 0	40.205.879,00	88,03	88,03	Tidak Ada Kendala		
		9 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.242.500,00	0,00	30.242.500,00	100,0 0	100,0 0	25.550.000,00	84,48	84,48	Tidak Ada Kendala		
		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.692.922,00	100,0 0	162.692.922,00	100,0 0	100,0 0	142.921.055,00	87,85	87,85	Tidak Ada Kendala		
		11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.070.600,00	100,0 0	58.070.600,00	100,0 0	100,0 0	52.244.350,00	89,97	89,97	Tidak Ada Kendala		
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : MONA FAUZALIA, S.E. TK												
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.701.869.302,00</b>	51,11	<b>1.701.869.302,00</b>	<b>100,0 0</b>	100,0 0	<b>1.576.823.305,00</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>			
		12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.919.260,00	0,00	26.919.260,00	100,0 0	100,0 0	25.669.700,00	95,36	95,36	Tidak Ada Kendala		
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.290.000,00	100,0 0	297.290.000,00	100,0 0	100,0 0	274.476.622,00	92,33	92,33	Tidak Ada Kendala		
		14 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	81.406.000,00	100,0 0	81.406.000,00	100,0 0	100,0 0	67.378.468,00	82,77	82,77	Tidak Ada Kendala		
		15 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	100,0 0	100,0 0	19.100.000,00	89,25	89,25	Tidak Ada Kendala		
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.547.000,00	0,00	282.547.000,00	100,0 0	100,0 0	276.740.000,00	97,94	97,94	Tidak Ada Kendala	Sedang Dalam Proses Pengadaan	
		17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.070.000,00	0,00	460.070.000,00	100,0 0	100,0 0	451.822.900,00	98,21	98,21	Tidak Ada Kendala		

		18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000,00	100,0 0	5.400.000,00	100,0 0	100,0 0	2.419.451,00	44,80	44,80	Tidak Ada Kendala	
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.786.600,00	0,00	10.786.600,00	100,0 0	100,0 0	10.340.000,00	95,86	95,86	Tidak Ada Kendala	
		20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.373.020,00	100,0 0	219.373.020,00	100,0 0	100,0 0	187.954.880,00	85,68	85,68	Tidak Ada Kendala	
	PP : YANTI RETNO IRIANI, TK : SSTP.												
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>79.865.900,00</b>	22,71	<b>79.865.900,00</b>	<b>100,0 0</b>	100,0 0	<b>64.058.150,00</b>	<b>80,21</b>	<b>80,21</b>		
		21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.136.900,00	100,0 0	18.136.900,00	100,0 0	100,0 0	16.207.900,00	89,36	89,36	Tidak Ada Kendala	
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : YANTI RETNO IRIANI, TK : SSTP.												
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>79.865.900,00</b>	22,71	<b>79.865.900,00</b>	<b>100,0 0</b>	100,0 0	<b>64.058.150,00</b>	<b>80,21</b>	<b>80,21</b>		
		22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.729.000,00	0,00	61.729.000,00	100,0 0	100,0 0	47.850.250,00	77,52	77,52	Kegiatan Evaluasi MR yang semula akan dilaksanakan di akhir November dialihkan ke Desember dikarenakan jadwal narasumber	Koordinasi Jadwal dengan narasumber
	PP : FACHMI NURHAYAT TK : RODIANA, S.E., M.Ak.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>12.428.304.261,00</b>	3,74	<b>12.428.304.261,00</b>	<b>100,0 0</b>	100,0 0	<b>3.919.749.271,00</b>	<b>31,54</b>	<b>31,54</b>		
		23	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31.828.200,00	0,00	31.828.200,00	100,0 0	100,0 0	30.430.850,00	95,61	95,61	Tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan Rekonsiliasi	

												dan Verifikasi Aset, Kewajiban, EKuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik	
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : FACHMI NURHAYAT TK : RODIANA, S.E., M.Ak.												
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>12.428.304.261,00</b>	3,74	<b>12.428.304.261,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>3.919.749.271,00</b>	<b>31,54</b>	<b>31,54</b>			
		24 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	464.585.550,00	100,00	464.585.550,00	100,00	100,00	424.046.451,00	91,27	91,27	Tidak Ada Kendala berat yang menghambat pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, semua masih dapat diatasi dan dijalankan dengan baik		
		25 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	66.243.750,00	0,00	66.243.750,00	100,00	100,00	66.179.100,00	99,90	99,90	Tidak Ada Kendala		
		26 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	32.615.300,00	0,00	32.615.300,00	100,00	100,00	31.282.300,00	95,91	95,91	Pengembalian atas temuan BPK belum seluruhnya terselesaikan, masih ada yang	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan SKPD untuk melakukan followup	

											melakukan cicilan pelunasan	terhadap pengembalian temuan BPK	
		27	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87.117.600,00	0,00	87.117.600,00	100,0 0	100,0 0	76.217.000,00	87,49	87,49	Tidak Ada Kendala	
		28	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.967.750,00	0,00	33.967.750,00	100,0 0	100,0 0	33.670.600,00	99,13	99,13	Tidak Ada Kendala	
		29	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40.737.000,00	0,00	40.737.000,00	100,0 0	100,0 0	40.196.400,00	98,67	98,67	Tidak Ada Kendala	
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.												
	PP : FACHMI NURHAYAT TK : RODIANA, S.E., M.Ak.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>12.428.304.261,00</b>	<b>3,74</b>	<b>12.428.304.261,00</b>	<b>100,0 0</b>	<b>100,0 0</b>	<b>3.919.749.271,00</b>	<b>31,54</b>	<b>31,54</b>		
		30	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	25.116.400,00	0,00	25.116.400,00	100,0 0	100,0 0	22.382.400,00	89,11	89,11	Terdapat kode rekening belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak muncul di penginputan transaksi non anggaran BOK di SIPD akuntansi pelaporan	Berkoordinasi dengan Pusdatin SIPD Provinsi Jawa Barat
		31	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	18.086.500,00	0,00	18.086.500,00	100,0 0	100,0 0	18.086.500,00	100,00	100,00	Tidak Ada Kendala	
		32	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,0 0	100,0 0	170.419.912,00	34,08	34,08		
		33	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.128.006.211,00	0,00	11.128.006.211,00	100,0 0	100,0 0	3.006.837.758,00	27,02	27,02		
	PP : EBY SUSANTO, S.A.B., TK : M.Ak.												

		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.932.823.109,00</b>	99,94	<b>10.932.823.109,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>7.166.535.218,00</b>	<b>65,55</b>	<b>65,55</b>		
		34 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.926.022.109,00	100,00	10.926.022.109,00	100,00	100,00	7.160.343.718,00	65,53	65,53	Tidak Ada Kendala	
		35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00	100,00	100,00	3.741.500,00	86,67	86,67	Tidak Ada Kendala	
		36 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	100,00	100,00	2.450.000,00	98,63	98,63	Jurnal Penyesuaian Untuk Aset Tetap dan Beban diBayar Dimuka	Konsultasi dengan subid akuntansi
1	KPA : HARJONO, S.Pd., M.M.											
	PP : EBY SUSANTO, S.A.B., TK : M.Ak.											
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>178.022.500,00</b>	100,00	<b>178.022.500,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>139.203.369,00</b>	<b>78,19</b>	<b>78,19</b>		
		37 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	178.022.500,00	100,00	178.022.500,00	100,00	100,00	139.203.369,00	78,19	78,19	Perubahan SIPD Penatausahaan menjadi SIPD RI Penatausahaan	Koordinasi secara intensif dengan Pusdatin Kemendagri
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.											
	PP : HARIS SANTIKA, S.Kom., TK : M.T.											
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>895.879.343,00</b>	51,03	<b>895.879.343,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>874.559.100,00</b>	<b>97,62</b>	<b>97,62</b>		
		38 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	208.039.050,00	100,00	208.039.050,00	100,00	100,00	205.740.400,00	98,90	98,90		
		39 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	157.686.644,00	0,00	157.686.644,00	100,00	100,00	154.213.000,00	97,80	97,80		
		40 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18.376.600,00	0,00	18.376.600,00	100,00	100,00	18.346.600,00	99,84	99,84		

		41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24.059.040,00	0,00	24.059.040,00	100,0 0	100,0 0	21.222.500,00	88,21	88,21		
		42	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	249.128.643,00	100,0 0	249.128.643,00	100,0 0	100,0 0	240.470.400,00	96,52	96,52		
		43	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	89.492.430,00	0,00	89.492.430,00	100,0 0	100,0 0	87.289.500,00	97,54	97,54		
		44	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	149.096.936,00	0,00	149.096.936,00	100,0 0	100,0 0	147.276.700,00	98,78	98,78		
	PP : DEKI DJOEMOEDILAGA TK : PERDANA, S.E., M.Ak.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>419.183.852,00</b>	0,00	<b>419.183.852,00</b>	<b>100,0 0</b>	<b>100,0 0</b>	<b>412.098.869,00</b>	<b>98,31</b>	<b>98,31</b>		
		45	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.502.915,00	0,00	72.502.915,00	100,0 0	100,0 0	69.608.300,00	96,01	96,01		
		46	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68.000.888,00	0,00	68.000.888,00	100,0 0	100,0 0	66.685.100,00	98,07	98,07		
2	KPA : ANDRI HARDIAN, S.E., M.Ak.												
	PP : DEKI DJOEMOEDILAGA TK : PERDANA, S.E., M.Ak.												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>419.183.852,00</b>	0,00	<b>419.183.852,00</b>	<b>100,0 0</b>	<b>100,0 0</b>	<b>412.098.869,00</b>	<b>98,31</b>	<b>98,31</b>		
		47	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	133.047.239,00	0,00	133.047.239,00	100,0 0	100,0 0	131.475.300,00	98,82	98,82		
		48	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	86.656.639,00	0,00	86.656.639,00	100,0 0	100,0 0	86.162.669,00	99,43	99,43	Tidak Ada	
		49	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	58.976.171,00	0,00	58.976.171,00	100,0 0	100,0 0	58.167.500,00	98,63	98,63	Tidak Ada	
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PP : IRA TRIANA TK : KUSRIANTINI, S.E., M.Ak.												

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>800.582.700,00</b>	86,18	<b>800.582.700,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>764.621.100,00</b>	<b>95,51</b>	<b>95,51</b>		
	50	Pengamanan Barang Milik Daerah	689.948.500,00	100,00	689.948.500,00	100,00	100,00	663.703.900,00	96,20	96,20	Mengumpulkan bukti riwayat perolehan (alas hak) dan Penentuan saksi untuk penanda batas lahan	
	51	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110.634.200,00	0,00	110.634.200,00	100,00	100,00	100.917.200,00	91,22	91,22	Kurangnya pengamanan dari perangkat daerah untuk barang-barang yang dalam penguasaannya, sehingga masih terjadi penguasaan barang oleh pihak luar	

3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PP : EVI YANTI, S.Si. TK												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.050.788.800,00</b>	25,08	<b>1.050.788.800,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>977.037.061,00</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>		
		52	Penyusunan Standar Harga	113.526.000,00	100,00	113.526.000,00	100,00	100,00	99.178.100,00	87,36	87,36	Jadwal Rapat Teknis mundur sehingga jadwal survey lapangan agak terlambat	Pelaporan hasil survey dilakukan bertahap agar pengolahan data hasil survey bisa dilakukan simultan dengan pelaksanaan survey
		53	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	93.365.100,00	0,00	93.365.100,00	100,00	100,00	93.216.100,00	99,84	99,84		
		54	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.426.600,00	0,00	20.426.600,00	100,00	100,00	15.030.600,00	73,58	73,58		
		55	Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.816.700,00	0,00	229.816.700,00	100,00	100,00	225.607.400,00	98,17	98,17	Masih ada beberapa data yang belum sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh bidang akuntansi dan beberapa pengurus barang belum paham inputing aplikasi persegi	Dilaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan data akuntansi dan pendampingan intensif dan bertahap antara Unit dan Sub Unit
		56	Inventarisasi Barang Milik Daerah	134.982.500,00	100,00	134.982.500,00	100,00	100,00	106.287.496,00	78,74	78,74	Perangkat Daerah yang memiliki BMD banyak untuk	Diberikan tambahan waktu 2 minggu untuk

											KIB C dan D belum selesai	menyelesaikan inventarisasi
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.											
	PP : EVI YANTI, S.Si. TK											
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.050.788.800,00</b>	25,08	<b>1.050.788.800,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>977.037.061,00</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>		
		52 Penyusunan Standar Harga	113.526.000,00	100,00	113.526.000,00	100,00	100,00	99.178.100,00	87,36	87,36	Jadwal Rapat Teknis mundur sehingga jadwal survey lapangan agak terlambat	Pelaporan hasil survey dilakukan bertahap agar pengolahan data hasil survey bisa dilakukan simultan dengan pelaksanaan survey
		53 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	93.365.100,00	0,00	93.365.100,00	100,00	100,00	93.216.100,00	99,84	99,84		
		54 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.426.600,00	0,00	20.426.600,00	100,00	100,00	15.030.600,00	73,58	73,58		
		55 Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.816.700,00	0,00	229.816.700,00	100,00	100,00	225.607.400,00	98,17	98,17	Masih ada beberapa data yang belum sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh bidang akuntansi dan beberapa pengurus barang belum paham inputing aplikasi persegi	Dilaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan data akuntansi dan pendampingan intensif dan bertahap antara Unit dan Sub Unit
		56 Inventarisasi Barang Milik Daerah	134.982.500,00	100,00	134.982.500,00	100,00	100,00	106.287.496,00	78,74	78,74	Perangkat Daerah yang memiliki BMD	Diberikan tambahan waktu 2

												banyak untuk KIB C dan D belum selesai	minggu untuk menyelesaikan inventarisasi
3	KPA : SYAEFUL RACHMAN, S.A.P., M.A.P., M.I.												
	PP : EVI YANTI, S.Si. TK												
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.050.788.800,00</b>	25,08	<b>1.050.788.800,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	<b>977.037.061,00</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>		
		57	Penilaian Barang Milik Daerah	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	100,00	100,00	270.242.465,00	93,19	93,19	Menentukan Kategori aset/maping fisik aset yang akan dinilai dengan data di KIB	
		58	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.096.100,00	0,00	24.096.100,00	100,00	100,00	24.046.100,00	99,79	99,79		
		59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	100,00	100,00	Banyak data yang belum sesuai dengan LRA sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan	Konsolidasi data dengan SPD dan Bidang Akuntansi
		60	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	129.575.800,00	0,00	129.575.800,00	100,00	100,00	128.428.800,00	99,11	99,11		
	<b>Total/Rata-rata</b>			<b>28.833.670.767,00</b>	<b>48,09</b>	<b>28.833.670.767,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.151.994.763,00</b>	<b>56,02</b>	<b>56,02</b>		

Evaluasi kinerja di BPKAD juga dilaksanakan per triwulan didasarkan kepada akumulasi realisasi fisik dan keuangan serta capaian target per triwulan. Capaian per triwulan juga melihat sejauh progres pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Evaluasi per triwulan dilaksanakan bersamaan dengan rapat internal BPKAD, sekaligus membahas isu-isu ataupun permasalahan lain diluar capaian target kinerja. Selain dalam rapat internal, Bappelitbangda juga melaksanakan monev capaian kinerja dengan dasar yang sama yaitu melihat realisasi fisik dan keuangan hanya saja dengan secara rinci melihat progres pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang menghambat.

Selain melihat realisasi fisik dan keuangan, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan dengan melihat rencana aksi dan rencana kerja yang telah dibuat dan direncanakan dalam tahun 2023, serta pada akhir triwulan dibandingkan kepada capaian akhir renstra.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023 ini, dapat kami simpulkan bahwa BPKAD Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja sebesar 99,92 %. terhadap satu sasaran strategis yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja penetapan APBD secara tepat waktu, presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah serta rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah, untuk mendukung pelaksanaan Misi Wali Kota Cimahi yang kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja BPKAD Kota Cimahi, maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang yang di antaranya :

1. Pencapaian Peningkatan Rasio Utilisasi Aset;
2. Mempertahankan Laporan Kinerja BPKAD Nilai “A”;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
4. Penambahan kebijakan-kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
5. *Adaptive* terhadap perubahan kondisi dan peraturan serta perundang-undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pemanfaatan aset;
2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan dan SIPD;

3. Mengikuti pelatihan, pembinaan dan konsultasi bagi ASN BPKAD Kota Cimahi;
4. Menyusun analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang ada pada BPKAD Kota Cimahi sehingga dapat memetakan kebutuhan pegawai;
5. Mapping tugas pokok dan fungsi diperkuat penyusunan SOP;
6. Koordinasi secara intensif kepada internal maupun eksternal.

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Link Google Drive
1	SOP Penyusunan Renja dan Renstra	<a href="https://bit.ly/3V9pYEg">bit.ly/3V9pYEg</a>
2	RPJPD Kota Cimahi 2005-2025	
3	RPD Kota Cimahi 2023-2026	
4	Renstra BPKAD Kota Cimahi 2023-2026	
5	Renja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	
6	Renja Perubahan BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	
7	Rencana Aksi 2023	
8	RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2023	
9	Screenshoot Renja, Renja Perubahan dan LKIP di ESR	
10	Pohon Kinerja 2023	
11	Cascading Renstra 2023-2026	
12	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2023	
13	SKP Pegawai Tahun 2023	
14	Monev Per Triwulan Tahun 2023	
15	Monev Rencana Aksi Tahun 2023	
16	LKIP Tahun 2023	
17	SK Tim LKIP 2023	
18	SK IKU, SK Renja	
19	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	
20	SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja	

21	SOP Evaluasi Kinerja Internal	
22	Perwal TPP	
23	SP Mutasi, Rotasi dan Mutasi	
24	Reviu LKIP 2023	
25	Sertifikat ASN Mengikuti Diklat SAKIP	
26	Screenshot SIPD RI dan E-reporting	
27	LHE AKIP Tahun 2022	